

## **BAB V** **KESIMPULAN**

Sejarah berdirinya Keraton Surakarta tidak terlepas dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Panembahan Senapati pada tahun 1575 dan menjadi sultan pertama. Kerajaan Mataram berkembang hingga mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung pada tahun 1613-1645. Keraton Surakarta didirikan oleh Paku Buwana II dengan gelar *Susuhunan Paku Buwana Senapati Ing Alaga Abdul Rahman Sayidin Panatagama*. Paku Buwana II menjadi raja pada usia 16 tahun.

Pada masa pemerintahan Paku Buwana II terjadi peristiwa geger pecinan, yaitu pemberontakan laskar-laskar Cina yang didukung oleh beberapa pangeran dan kerabat raja. Susuhunan Paku Buwana II berhasil merebut kembali Keraton Kartasura namun Keraton Kartasura sudah tidak pantas untuk dijadikan keraton. Melihat keadaan tersebut Susuhunan Paku Buwana II memindahkan Keraton Kartasura ke Desa Solo dengan berbagai pertimbangan. Keraton Kartasura dipindahkan ke Desa Solo pada tanggal 17 Februari 1745 dan tanggal tersebut dijadikan tanggal berdirinya keraton baru yang diberi nama Keraton Surakarta Hadiningrat.

Mengenai proses konflik raja kembar Keraton Surakarta, konflik raja kembar Kasunanan Surakarta ini berawal sejak meninggalnya Paku Buwono XII pada 12 Juni 2004. Keributan tersebut dipicu oleh persengketaan di antara 35 anak Paku Buwana XII dari enam orang selir. Persengketaan tersebut tentang

siapa yang berhak menduduki tahta berikutnya. Dalam tradisi kerajaan Jawa, pengganti raja yang meninggal adalah anak lelaki tertua dari permaisuri, sementara sampai Paku Buwana XII meninggal tidak mengangkat seorang permaisuri. Perebutan tahta terjadi antara KGPH Hangabehi dan Tedjowulan yang lahir dari ibu yang berbeda.

Pertempuran memperebutkan tahta pun mencapai puncaknya pada Agustus 2004 di mana Kubu Tedjowulan mengukuhkan perwira TNI AD tersebut sebagai Paku Buwana XIII. Penobatan Tedjowulan dilakukan di Ndalem Sasana Purnama, Kotabarat Mangkubumen. Lokasi berada sekitar enam kilometer dari kompleks Keraton Surakarta. Pengukuhan dilakukan di luar keraton karena pada hari itu Kubu KGPH Hangabehi menggembok pintu gerbang keraton dan sebulan kemudian Kubu KGPH Hangabehi melakukan tindakan sama yaitu melantik KGPH Hangabehi juga sebagai Paku Buwana XIII.

Proses penyelesaian konflik raja kembar di Keraton Surakarta terlihat menunjukkan titik terang pada tahun 2012. KGPH Tedjowulan telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan rekonsiliasi dengan Paku Buwana XIII Hangabehi dan siap melepas gelar raja. Walaupun KGPH Tedjowulan siap melepas gelar raja namun beliau mendapatkan posisi sebagai wakil raja untuk mendampingi KGPH Hangabehi.

Adapun dampak konflik antara KGPH Hangabehi dengan KGPH Tedjowulan yaitu antara lain semakin berkurangnya jumlah abdi dalem yang beraktivitas di lingkungan Keraton Suarakarta Hadiningrat. Selain itu, akibat dari

adanya *dualisme* kepemimpinan Keraton Surakarta menyebabkan dana yang diberikan dari pemerintah pusat mendapatkan kendala. Adanya kendala dana tersebut, perbaikan untuk Keraton Surakarta menjadi terhambat. Selain itu citra Keraton Surakarta semakin pudar.

Pasca konflik dengan adanya rekonsiliasi membawa dampak yang cukup menggembirakan bagi abdi dalem. Adapun kabar gembiranya yaitu abdi dalem akan menerima gaji selama tiga bulan, menerima tunjangan hari raya, dan juga kenaikan gaji yang menyesuaikan upah minimum kota. Pejabat Humas *dwitunggal* yang bernama Suryo Wicaksono menegaskan paling lambat dalam sebulan ini, gaji ratusan abdi dalem Keraton Surakarta yang menunggak selama tiga bulan.

Terkait dana hibah, Gubernur Jawa Tengah bernama Babit Waluyo menanti susunan kabinet *dwitunggal* sehingga dana bisa dicairkan. Pihak Keraton Surakarta akan *legalisasi* ulang ijazah gelar kebangsawanannya jadi urusan surat menyurat harus melalui raja dan wakilnya. Pemerintahan *dwitunggal* juga akan membentuk lembaga hukum yang mengawasi dan memproses terkait gelar kehormatan dari Keraton Surakarta. Pelaksanaan dari rekonsiliasi sampai saat ini belum terealisasikan dan pemerintah akan terus memantau perkembangan pasca rekonsiliasi.